



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Jendral A. Yani No. 84 Telp. (0519) 21396 MUARA TEWEH 73812

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmatNya lah kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kita dengan baik.

Penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024 yaitu memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan rencana kerja dalam rangka memenuhi dokumen perencanaan tahun sebagai acuan utama perencanaan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan Kabupaten Barito Utara yaitu sebagai penentu arah perkembangan pembangunan terutama di bidang pangan dan perikanan.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terus berproses ke tahap selanjutnya, namun merupakan harapan kita bersama bahwa perencanaan kerja ini dapat berfungsi untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam kita membina dan melayani masyarakat.

Dengan semangat “IYA MULIK BENGKANG TURAN“ kita bangun Barito Utara dengan segala kemampuan yang ada agar masyarakat dapat hidup bahagia dan sejahtera.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita serta meridhoi segala tugas pengabdian yang kita berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Muara Teweh, Maret 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara,



Ir. SUGENG, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	28
BAB V. PENUTUP	29
LAMPIRAN.....	30



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2023. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati.

Berdasarkan Visi Bupati Barito Utara dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yakni : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan” Menyadari sepenuhnya akan upaya untuk mewujudkan Kabupaten Barito Utara sebagaimana visi Bupati Barito Utara di maksud, maka Pemerintah Daerah telah menuangkan keseriusan dalam penanganan pangan dan pengembangan perikanan di wilayah Kabupaten Barito Utara yang di tuangkan dalam rencana program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pemantapan ketahanan pangan dan perikanan dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulan masalah pangan dan gizi serta pengembangan produksi perikanan dan serta produk unggulan perikanan melalui petani pembudidaya ikan perlu mendapat perhatian dalam rangka pertumbuhan ekonomi.



1.2 Landasan Hukum

Dinas Ketahanan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022



- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1842);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370808 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 780);
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589);



35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039



- (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
 42. Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara diberikan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah untuk mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan dorongan partisipasi masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara ini di susun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar subtransi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian



tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun – tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang di kaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Khusus Provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabuapten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.



Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang di kaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya : pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengetasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebarab lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut smber pendanaannya. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB. IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan di lakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan di gunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan sekaligus pelaksana untuk melaksanakannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan renja Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten Barito Utara tahun 2021 dan pencapaian renstra Dinas ketahanan pangan dan perikanan sampai dengan tahun 2022, di uraikan pada Tabel 1 (Lampiran 1).

Pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator



kinerja ini di ikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Total anggaran tahun 2020 Dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 9.062.989.243,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.134.514.825,- atau 92,92 %.

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 Pagu berdasarkan Dokumen Perubahan Pengguna Anggaran Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 8.925.531.430,-** (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan Realisasi anggaran Dokumen Perubahan Pengguna Anggaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 8.126.717.665,-** (Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau 91.05% dari pagu anggaran

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan di tempuh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan;
- b. Mendorong terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat;
- c. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan;



- d. Mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
 - e. Mendorong pengembangan teknologi pengolahan terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;
 - f. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan; dan
 - g. Mendorong pelayanan perikanan terhadap masyarakat pedesaan melalui kelompok budidaya ikan.
2. Arah Kebijakan
- a. Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan;
 - d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makan beragam, bergizi, berimbang dan aman sejak usia dini;
 - e. Fasilitas promosi produk unggulan daerah;
 - f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan; dan
 - g. Meningkatkan pelayanan perikanan terhadap masyarakat kelompok budidaya ikan (pokdakan).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan standar pelayanan minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta indikator kinerja kunci (IKK), sesuai dengan PP nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas ketahanan pangan dan perikanan sementara ini belum memiliki dokumen SPM yang berkenaan dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan



mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan perikanan dan pangan, di gunakan IKK dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan DKPP Kabupaten Barito Utara. Dapat di lihat pada Tabel 2 (Lampiran 2).

Adapun kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan perikanan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan dan perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pangan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan perikanan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Berdasarkan uraian fungsi tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas ketahanan pangan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan Utama

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini merupakan perhitungan antara rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dengan jumlah penduduk (jiwa)

2. Produksi perikanan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini merupakan jumlah antara produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (ton) di bagi dengan target daerah (ton) maka di dapat capaian kinerja.

3. Konsumsi ikan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan jumlah antara jumlah konsumsi ikan (kg) dengan target daerah (kg).



4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan Jumlah Cakupan Bina Kelompok Nelayan.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas ketahanan pangan dan perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.
3. Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Kepala Bidang Penangkapan, Kelembagaan, Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan
7. Kepala BPBAT Trinsing, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBAT Trinsing.
8. Kepala BPBAT Lahei, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBAT Lahei
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Isu – isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Proses penyelenggaraan peningkatan bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan Pemerintah kabupaten Barito Utara, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi potensi dan



ancaman menjadi peluang dalam isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKPP antara lain :

1. Sinergitas koordinasi dan pelaksanaan lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal dalam mendukung pembangunan di tiap zona;
2. Optimalisasi fasilitasi sarana dan prasarana baik produksi, finansial dan kemitraan, serta jejaring pemasaran produk bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
3. Kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama pemerintahan tingkat kecamatan dan desa;
4. Penciptaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sumber daya yang berkualitas.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seakan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang yang dapat terfasilitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi pernyataan di atas. Untuk dapat mendukung kondisi yaang diinginkan kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan di bidang pangan dan perikanan di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan, namun seiring dengan perkembangannya di samping beberapa keberhasilan program / kegiatan pada masa sebelumnya, masih dihadapi beberapa permasalahan strstegis yang berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi penyelenggaraannya, yaitu :

1. Belum optimalnya tingkat pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja, sehingga cukup menghambat optimalisasi pemberdayaan sumber daya aparatur selaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan baik secara kuantitas maupun kualitas;



3. Masih reaktif rendahnya tingkat akselerasi penyuluhan bagi peningkatan produksi dan produktivitas usaha kelompok binaannya;
4. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat;
5. Belum optimalnya hubungan koordinasi dengan instansi terkait; dan
6. Belum optimalnya perhatian fokus penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan terhadap penyelenggaraan program / kegiatan di bidang pangan dan perikanan di wilayahnya.

Sedangkan langkah-langkah untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

1. Koordinasi intensif dengan dinas terkait/instansi terkait terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan, serta upaya optimalisasi pemanfaatan lahan usaha melalui intensifikasi pertanian dan perikanan;
2. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok pembudidaya dan tani yang belum memenuhi legalitas formal kelas kemampuan kelompok;
3. Pelaksanaan temu tenis, mimbar sarasehan, seminar, lokakarya dalam rangka transfer inovasi teknologi dengan keterlibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa melalui rapat dan forum koordinasi lainnya
4. Melaksanakan koordinasi dan upaya sinergitas pembiayaan dengan unsur pemerintahan baik pusat maupun provinsi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD di maksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.



Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta paguindikatif yang di alokasikan untuk setiap program / kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasantemuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Telaahan terhadap review rancangan awal RKPD tahun 2023 lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 (Lampiran 3).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas ketahanan pangan dan perikanan menyusun usulan program dan kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap priritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;



2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yang disajikan dalam Tabel 4 (Lampiran 4).



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Berdasarkan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan termasuk dalam Misi 3 yaitu : “Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”. Misi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Pembangunan petekekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil – hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Demi kepentingan kemakmuran masyarakat sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional di jabarkan sebagai berikut :



1. Meningkatkan pengembangan lumbung pangan di daerah dan desa.
2. Meningkatkan pengembangan cadangan pangan di daerah dan desa.
3. Penguatan kelembagaan di tingkat desa untuk membantu aksesibilitas masyarakat terhadap pangan strategis.
4. Pembinaan sistem produksi dan konsumsi pangan masyarakat agar terhindar dari cemaran biologis, kimia dan fisik berbahaya.
5. Meningkatkan luas lahan fungsional, kuantitas dan kualitas produksi perikanan.
6. Meningkatkan permintaan pasar terhadap produk perikanan.

Berdasarkan misi tersebut, maka arah kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan.
2. Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makan beragam, bergizi, berimbang dan aman sejak usia dini.
5. Fasilitas promosi produk unggulan daerah.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
7. Meningkatkan pelayanan perikanan terhadap masyarakat kelompok budidaya ikan (POKDAKAN).

Dinas Ketahanan pangan dan perikanan melaksanakan program prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - 1.1 Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan.
 - 1.2 Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.



- 1.3 Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, meliputi kegiatan :
 - 2.1 Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
 - 2.2 Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, meliputi kegiatan :
 - 3.1 Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan program dan kegiatan renja Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan tahun 2023, merupakan tujuan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Barito Utara guna mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana tujuan tersebut meliputi :

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dengan berfungsinya sub sub ketersediaan, distribusi dan konsumsi secara sinergis serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah kecamatan/desa.
2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita
3. Mengembangkan kemitraaan dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan/Desa.
4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kewaspadaan pangan masyarakat, mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan di daerah.
5. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan.
6. Mengembangkan pola konsumsi pangan.
7. Mengembangkan pembudidayaan ikan.



8. Mengembangkan perikanan tangkap.
9. Mengembangkan sistem penyuluhan perikanan.
10. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

Adapun sasaran dari program dan kegiatan renja yang didasarkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Tersedianya ketersediaan pangan yang cukup di daerah.
2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dengan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mempertahankan kemandirian pangan di setiap desa.
4. Meningkatkan kelembagaan usaha kelompok masyarakat dalam memperbaiki konsumsi pangan yang bergizi serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan.
5. Menurunnya tingkat kerawanan pangan.
6. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
7. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan terutama pada kelompok pembudidaya ikan.
8. Terwujudnya teknologi pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perikanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program dan kegiatan yang di rancang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara untuk dioperasionalkan pada tahun 2022, terdiri dari :



Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok / Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - 2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
 - 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi
04. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota
05. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Kabupaten / Kota



- 04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- 05. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - 2.01 Pengawasan Sumberdaya Perikanan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- 06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan kecil
 - 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota



BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan tahun 2023, maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp. 12.208.651.891,-

Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan merupakan ringkasan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara.



BAB. V. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diharapkan, dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara.

Perumusan perencanaan kerja akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari semua pihak yang terkait melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan penentuan visi, misi dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara telah menetapkan arah yang akan di tuju olehnya.

Dalam perencanaan kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak terlepas dari Rencana Strategis Daerah Kabupaten Barito Utara sehingga untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah memerlukan banyak dukungan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala serta terciptanya kondisi keterbukaan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Muara Teweh, Juni 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara

Ir. SUGENG, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660816 199303 1 006

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Barito Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten/kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun, 42 Orang	1 Tahun, 42 Orang	1 Tahun, 42 Orang	1 Tahun, 42 Orang	100%	1 Tahun, 42 Orang	1 Tahun, 42 Orang	100%
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan dan kinerja pegawai	1 Gedung, 1 Tahun	1 Tahun	3 Unit, 10 Unit, 1 Gedung, 1 Tahun	3 Unit, 10 Unit, 1 Gedung, 1 Tahun	100%	1 Gedung, 1 Tahun	1 Gedung, 1 Tahun	100%
3	Program Penanganan Kerawanan pangan	Meningkatnya disiplin berpakaian aparaturn	-	-	105 Stel	105 Stel	100%	-	-	100%
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	5 Kali	5 Kali	100%
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95 Eksemplar	95 Eksemplar	95 Eksemplar	95 Eksemplar	100%	95 Eksemplar	95 Eksemplar	100%
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya ketahanan pangan	146,36 Kg/Kap/Tahun	144,83 Kg/kap/Tahun	146,24 Kg/Kap/Tahun	146,24 Kg/Kap/Tahun	100%	146,36 Kg/Kap/Tahun	146,36 Kg/Kap/Tahun	100%
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi unggulan daerah	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100%
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan	6280,92 ton	5390,27 ton	5116,8 ton	5116,8 ton	100%	6280,92 ton	6280,92 ton	100%
9	Program pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya pengembangan perikanan tangkap	86 Kelompok	83 Kelompok	75 Kelompok	75 Kelompok	100%	86 Kelompok	86 Kelompok	100%

10	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatnya perkembangan sistem penyuluhan perikanan	3 Data	3 Data	3 Data	3 Data	100%	3 Data	3 Data	100%
11	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Optimalnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	1099,4 ton, 47 Kg/kap/Tahun	1096,80 ton, 47,23 Kg/Kap/Tahun	1094,4 ton 40,85 Kg/Kap/Tahun	1094,4 ton 40,85 Kg/Kap/Tahun	100%	1099,4 ton, 47 Kg/kap/Tahun	1099,4 ton, 47 Kg/kap/Tahun	100%
12	Program peningkatan keamanan pangan	Meningkatnya kewanamanan pangan di masyarakat	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100%
13	Program pengendalian hama penyakit tanaman pangan, perikanan dan peternakan	Meningkatnya pengendalian hama penyakit ikan	65%	60%	60%	60%	100%	65%	65%	100%

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian					Proyeksi Th. 2023	Proyeksi Th. 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11		12			13
1	Jumlah ketersediaan pangan utama (Kg/Kap/Thn)	-	146,36	146,24	146,36	147,85	148,24	149,45	150,23	150,53	224,23	234,72	146,49	171,92	147,23	150,23	150,53	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) x 1000
																		Jumlah Penduduk (Jiwa)
2	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	-	7375,72	6211,20	7375,72	8318,36	9403,31	10559,51	11765,06	10017,64	6952,11	6952,11	8013,87	8236,70	9991,14	11765,06	10017,64	Jumlah Produksi Ikan (Ton) x 100%
																		Target Daerah (Ton)
3	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	-	47,00	40,85	47,00	47,53	48,04	48,59	49,02	49,32	48,00	48,00	47,53	48,04	48,59	49,02	49,32	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) x 100%
																		Target Daerah (Kg)
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	-	86	75	86	88	90	92	95	95	90	90	88	90	92	95	95	Target Statistik Perikanan Tangkap

Tabel 3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Barito Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN			10.527.598.711	URUSAN PEMERINTAHAN			10.527.598.711	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			9.577.598.711	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			9.577.598.711	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Thn	24.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Thn	24.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja SKPD	20 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja SKPD	20 Laporan	3.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Thn	6.171.198.711	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Thn	6.171.198.711	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.956.198.711	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang/bulan	5.956.198.711	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	190.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	190.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran	4 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran	4 laporan	7.500.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	7.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Thn	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Thn	150.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat		1 Thn	625.000.000	Administrasi Umum Perangkat		1 Thn	625.000.000	

	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor yang disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor yang disediakan	12 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	20.000.000	
	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	100.000.000	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	350.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Thn	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Thn	250.000.000	
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	100.000.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Thn	1.037.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Thn	1.037.400.000	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komuikasi Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	140.000.000	Penyediaan Jasa Komuikasi Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	887.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	887.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		1 Thn	1.320.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		1 Thn	1.320.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinanya	40 Unit	300.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinanya	40 Unit	300.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	20.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	1.000.000.000	

	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			640.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			640.000.000	
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan		1 Thn	310.000.000	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan		1 Thn	310.000.000	
	Penyediaan Pangan berbasis Sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber daya lokal yang tersediao	1 Laporan	80.000.000	Penyediaan Pangan berbasis Sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber daya lokal yang tersediao	1 Laporan	80.000.000	
	Koordinasi, sikronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, sikronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	1 Laporan	60.000.000	Koordinasi, sikronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, sikronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	1 Laporan	60.000.000	
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	7 Unit	100.000.000	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	7 Unit	100.000.000	
	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	1 Laporan	15.000.000	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	1 Laporan	15.000.000	
	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	1 Dokumen	55.000.000	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	1 Dokumen	55.000.000	
	Penentuan Harga Minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi		1 Laporan	50.000.000	Penentuan Harga Minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi		1 Laporan	50.000.000	

	Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga Minuman pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga Minuman pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1 Laporan	50.000.000	
	Pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		1 Thn	280.000.000	Pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		1 Thn	280.000.000	
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	Target Konsumsi pangan perkapita per tahun	1 Dokumen	30.000.000	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	Target Konsumsi pangan perkapita per tahun	1 Dokumen	30.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	250.000.000	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	12 Laporan	250.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			140.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			140.000.000	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan		1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan		1 Dokumen	10.000.000	
	Penyusunan, Pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan, pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	10.000.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Thn	130.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Thn	130.000.000	

	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000	
	Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000	Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			170.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			170.000.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota		1 Dokumen	170.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota		1 Dokumen	170.000.000	
	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	1 Dokumen	120.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	1 Dokumen	120.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.985.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.985.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			475.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			475.000.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya nyang Dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota		1 Thn	315.000.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya nyang Dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota		1 Thn	315.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	10 Unit	150.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	10 Unit	150.000.000	
	Penjamin ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tesedia	10 Unit	150.000.000	Penjamin ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tesedia	10 Unit	150.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten /Kota		50 Orang, 10 Kel	160.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten /Kota		50 Orang, 10 Kel	160.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	50 Orang	80.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	50 Orang	80.000.000	

	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya	10 Kelompok	80.000.000	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya	10 Kelompok	80.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			3.015.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			3.015.000.000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		30 Kelompok	300.000.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		30 Kelompok	300.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	30 Kelompok	300.000.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	30 Kelompok	300.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan ikan		1 Thn	2.715.000.000	Pengelolaan Pembudidayaan ikan		1 Thn	2.715.000.000	
	Penyediaan Data dan informasi Pembudidayaan ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Data dan informasi Pembudidayaan ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudiyaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah/kota	5 unit	1.400.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudiyaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah/kota	5 unit	1.400.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	10 Unit	1.000.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	10 Unit	1.000.000.000	

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	1 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	1 Dokumen	50.000.000	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100 Orang	150.000.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100 Orang	150.000.000	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2 Ha	100.000.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2 Ha	100.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			300.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			300.000.000	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	300.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	300.000.000	

Pengawasan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	150.000.000	Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	150.000.000	
Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang Pembudidayaan ikan di wilayah sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	150.000.000	Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang Pembudidayaan ikan di wilayah sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	1 Dokumen	150.000.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			195.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			195.000.000	
Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		2 Laporan	15.000.000	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		2 Laporan	15.000.000	

Penyediaan Data dan informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Data dan informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	15.000.000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil			80.000.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil			80.000.000	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	10 Unit usaha	80.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	10 Unit usaha	80.000.000	
Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		100 Pelaku usaha	100.000.000	Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		100 Pelaku usaha	100.000.000	
Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota yang terfasilitasi	100 Pelaku usaha	100.000.000	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota yang terfasilitasi	100 Pelaku usaha	100.000.000	

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Barito Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Bidang Urusan Pangan				
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
	- Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Kecamatan/Desa	Jumlah ketersediaan pangan	9 Kecamatan	Bidang Pangan
	- Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Kecamatan	Stabilisasi harga pangan	9 Kecamatan	Bidang Pangan
	- Pengembangan lumbung pangan desa	Batu Raya I, Mampuak I, Desa Rimba Sari, Montallat II	Jumlah ketersediaan gabah padi	4 Desa	Bidang Pangan
	- Pembinaan dan pemantauan distribusi pangan	Kecamatan	Jumlah distribusi pangan	9 Kecamatan	Bidang Pangan
	- Pembinaan sumber daya dan kerawanan pangan	Desa	Jumlah kewaspadaan pangan dan gizi menurun	1 Desa	Bidang Pangan
2	Program Peningkatan Keamanan Pangan				
	- Sosialisasi keamanan pangan dari pengguna bahan berbahaya/terlarang	Kecamatan/Desa	Jumlah pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan	Kecamatan/Desa	Bidang Pangan
	Bidang Kelautan dan Perikanan				
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				
	- Pembinaan kelompok tani pembudidaya ikan	Kec.Teweh Tengah	Jumlah masyarakat pembudidaya ikan	35 orang	Bidang Perikanan
	- Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	DKPP	Jumlah produksi ikan hasil budidaya meningkat	-	Bidang Perikanan

2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				
	- Pembinaan kelompok nelayan perikanan tangkap	Kecamatan	Jumlah produksi ikan lestari nelayan meningkat	-	Bidang Perikanan
	- Pembinaan dan pengembangan metode penangkapan	Kecamatan	Jumlah nelayan yang menguasai teknis penangkapan	-	Bidang Perikanan

Tabel 5.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Barito Utara

1
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		DKPP		10.527.598.711				5.523.589.871
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		DKPP		9.577.598.711				4.438.089.871
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DKPP	1 Thn	24.000.000			1 Thn	25.200.000
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKPP	6 Dokumen	3.500.000	DAU		6 Dokumen	3.675.000
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKPP	2 Dokumen	3.500.000	DAU		2 Dokumen	3.675.000
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKPP	1 Dokumen	3.500.000	DAU		1 Dokumen	3.675.000

2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DKPP	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.250.000
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKPP	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.250.000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja SKPD	DKPP	20 Laporan	3.500.000	DAU		20 Laporan	3.675.000
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DKPP	1 Thn	6.171.198.711			1 Thn	921.369.871
2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DKPP	50 Orang/bulan	5.956.198.711	DAU		50 Orang/bulan	695.619.871
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DKPP	1 Buku	190.000.000	DAU		1 Buku	199.500.000
2	09	01'	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKPP	1 laporan	10.000.000	DAU		1 laporan	10.500.000
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran	DKPP	4 laporan	7.500.000	DAU		4 laporan	7.875.000

2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKPP	2 Dokumen	7.500.000	DAU		2 Dokumen	7.875.000
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		DKPP	1 Thn	150.000.000			1 Thn	150.000.000
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DKPP	10 Orang	150.000.000	DAU		10 Orang	150.000.000
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		DKPP	1 Thn	625.000.000			1 Thn	642.750.000
2	09	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	DKPP	12 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	21.000.000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKPP	12 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	21.000.000
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Rumah tangga	Terlaksananya jasa penyediaan sarana rumah tangga	DKPP	12 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	25.000.000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Terlaksananya bahan logistik kantor	DKPP	12 paket	100.000.000	DAU		12 paket	105.000.000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pelayanan percetakan dan penggandaan	DKPP	12 Paket	100.000.000	DAU		12 Paket	105.000.000
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Terlaksananya langganan koran dan majalah	DKPP	12 Dokumen	15.000.000	DAU		12 Dokumen	15.750.000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	DKPP	12 laporan	350.000.000	DAU		12 laporan	350.000.000
2	09	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DKPP	1 Thn	250.000.000			1 Thn	223.500.000

					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket meubeul yang disediakan	DKPP	10 Unit	100.000.000	DAU		10 Unit	73.500.000
2	09	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	16 Unit	10 Unit	150.000.000	DAU		10 Unit	150.000.000
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DKPP	1 Thn	1.037.400.000			1 Thn	1.089.270.000
2	09	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	DKPP	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.500.000
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komuikasi Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DKPP	12 Laporan	140.000.000	DAU		12 Laporan	147.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DKPP	12 Laporan	887.400.000	DAU		12 Laporan	931.770.000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		DKPP	1 Thn	1.320.000.000			1 Thn	1.386.000.000
2	09	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya pembayaran pajak kendaraan	DKPP	40 Unit	300.000.000	DAU		40 Unit	315.000.000
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	DKPP	30 unit	20.000.000	DAU		30 unit	21.000.000
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DKPP	2 Unit	1.000.000.000	DAU		2 Unit	1.050.000.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DKPP		640.000.000				755.000.000

2	09	03	2.01		Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan		DKPP	1 Thn	310.000.000			1 Thn	365.000.000
2	09	03	2.01	01	Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca bahan Makanan	-	DKPP	-	-	DAU		-	-
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan berbasis Sumber daya lokal	pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	DKPP	1 Laporan	80.000.000	DAU		1 Laporan	80.000.000
2	09	03	2,01	03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	DKPP	1 Laporan	60.000.000	DAU		1 Laporan	60.000.000
2	09	03	2,01	06	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan	DKPP	7 Unit	100.000.000	DAU		7 Unit	150.000.000
					Penyediaan Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kab/kota	informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kab/kota	DKPP	1 Laporan	15.000.000	DAU		1 Laporan	15.000.000
					Pemantauan harga dan pasokan pangan	informasi harga dan pasokan pangan	DKPP	1 Dokumen	55.000.000	DAU		1 Dokumen	60.000.000
2	09	03	2,03		Penentuan Harga Minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi		DKPP		50.000.000				60.000.000
2	09	03	2,03	01	Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga Minuman pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	DKPP	1 laporan	50.000.000	DAU		1 laporan	60.000.000

2	09	03	2,04		Pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		DKPP	1 Thn	280.000.000			1 Thn	330.000.000
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	target konsumsi pangan perkapita per tahun	DKPP	1 Dokumen	30.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	DKPP	12 Laporan	250.000.000	DAK NON FISIK		12 Laporan	300.000.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		DKPP		140.000.000	DAU			150.500.000
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan		DKPP	1 Buku	10.000.000			1 Buku	10.500.000
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	DKPP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Buku	10.500.000
2	09	04	↑2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		DKPP	3 Kecamatan, 1 Paket	130.000.000			3 Kecamatan, 1 Paket	140.000.000
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan dan gizi kabupaten/kota	DKPP	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	60.000.000
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	DKPP	1 Dokumen	80.000.000	DAU		1 Dokumen	80.000.000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		DKPP		170.000.000				180.000.000

2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota		DKPP	1 Thn	170.000.000			1 Thn	180.000.000
2	09	05	2,01	04	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	DKPP	1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	60.000.000
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan DaerahKabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan DaerahKabupaten /Kota	DKPP	1 Dokumen	120.000.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKPP		3.835.000.000				4.243.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DKPP		325.000.000				490.000.000
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya nyang Dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota		DKPP	1 Thn	165.000.000			1 Thn	330.000.000
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	DKPP	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	DKPP	10 Unit	150.000.000	DAU		10 Unit	157.500.000
					Penjamin Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	DKPP	10 Unit	150.000.000	DAU		10 Unit	157.500.000

3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten /Kota		DKPP		160.000.000				160.000.000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	DKPP	50 Orang	80.000.000	DAU		50 Orang	80.000.000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaanya	DKPP	10 Kelompok	80.000.000	DAU		10 Kelompok	80.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		DKPP		3.015.000.000				3.262.500.000
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		DKPP	30 Kelompok	300.000.000			30 Kelompok	315.000.000
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	DKPP	30 Kelompok	300.000.000	DAU		30 Kelompok	315.000.000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		DKPP	1 Thn	2.715.000.000			1 Thn	2.947.500.000
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan informasi Pembudidayaan ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	DKPP	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudiyaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah/kota	DKPP	5 unit	1.400.000.000	DAK FISIK		5 unit	1.575.000.000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah	DKPP	10 Unit	1.000.000.000	DAU		10 Unit	1.050.000.000

3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	DKPP	1 Kegiatan	50.000.000	DAU		1 Kegiatan	50.000.000
3	25	04	2,04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan	DKPP	100 Orang	150.000.000	DAU		100 Orang	157.500.000
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	DKPP	2 Ha	100.000.000	DAU		2 Ha	100.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKPP		300.000.000				300.000.000
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		DKPP	1 Kegiatan	300.000.000			1 Kegiatan	300.000.000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	DKPP	1 Kegiatan	150.000.000	DAU		1 Kegiatan	150.000.000

					Pengawasan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	DKPP	1 Dokumen	150.000.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DKPP		195.000.000				190.500.000
3	25	06	2.01		Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		DKPP		15.000.000				10.500.000
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	DKPP	1 Dokumen	15.000.000	DAU		1 Dokumen	10.500.000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil		DKPP	10 unit	80.000.000			10 unit	80.000.000
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usahapengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	DKPP	10 unit	80.000.000	DAU		10 unit	80.000.000

3	25	06	2,03		Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		DKPP	100 Usaha pelaku	100.000.000			100 Usaha pelaku	100.000.000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	DKPP	100 Usaha pelaku	100.000.000	DAU		100 Usaha pelaku	100.000.000



Tabel 6.
Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024
Kabupaten Barito Utara

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
BIDANG : EKONOMI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2023	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		DKPP									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		DKPP							10.527.598.711		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		DKPP							9.577.598.711		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DKPP							24.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat daerah	DKPP	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah	1 Thn	Terlaksananya dokumen perencanaan daerah	1 Thn	Tersedianya dokumen perencanaan daerah	1 Thn	3.500.000	DKPP	Lanjutan
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat daerah	DKPP	Tersedianya RKA/DPA	1 Thn	Terlaksananya RKA/DPA	1 Thn	Tersedianya RKA/DPA	1 Thn	3.500.000	DKPP	Lanjutan
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat daerah	DKPP	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan	1 Thn	Terlaksana Dokumen RKA Perubahan	1 Thn	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan	1 Thn	3.500.000	DKPP	Lanjutan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat daerah	DKPP	Tersedianya Dokumen DPA	1 Thn	Terlaksananya Dokumen DPA	1 Thn	Tersusunnya Dokumen DPA	1 Thn	5.000.000	DKPP	Lanjutan

	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat daerah	DKPP	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan	1 Thn	Terlaksananya Dokumen DPA Perubahan	1 Thn	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan	1 Thn	5.000.000	DKPP	Lanjutan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat daerah	DKPP	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Thn	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Thn	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 Thn	3.500.000	DKPP	Lanjutan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DKPP							6.171.198.711		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	Tersusunnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	5.956.198.711	DKPP	Lanjutan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya pembayaran jasa tenaga honorarium dan jasa kantor	1 Thn	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga honorarium dan jasa kantor	1 Thn	Tersusunnya pembayaran jasa tenaga honorarium dan jasa kantor	1 Thn	190.000.000	DKPP	Lanjutan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya laporan keuangan SKPD	1 Thn	Terlaksananya laporan keuangan SKPD	1 Thn	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	1 Thn	10.000.000	DKPP	Lanjutan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/ Semesteran SKPD	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran	1 Thn	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 Thn	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 Thn	7.500.000	DKPP	Lanjutan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya laporan prognosis	1 Thn	Terlaksananya laporan prognosis	1 Thn	Tersusunnya laporan prognosis	1 Thn	7.500.000	DKPP	Lanjutan

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		DKPP		1 Thn		1 Thn		1 Thn	150.000.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya sumber daya aparatur yang handal	DKPP	Tersedianya Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan	1 Thn	Terlaksananya Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan	1 Thn	Tersusunnya Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan	1 Thn	150.000.000	DKPP	Lanjutan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		DKPP		1 Thn		1 Thn		1 Thn	625.000.000		
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik	1 Thn	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	1 Thn	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik	1 Thn	20.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	20.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Peralatan dan Rumah tangga	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Meningkatnya jasa penyediaan sarana rumah tangga	1 Thn	Terlaksananya jasa penyediaan sarana rumah tangga	1 Thn	Tersedianya jasa penyediaan sarana rumah tangga	1 Thn	20.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan bahan Logistik kantor	Lancarnya Pelayanan Administrasi Kantor	DKPP	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Thn	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Thn	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Thn	100.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya pelayanan percetakan dan penggandaan	1 Thn	Terlaksananya pelayanan percetakan dan penggandaan	1 Thn	Terlaksananya pelayanan percetakan dan penggandaan	1 Thn	100.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya langganan koran dan majalah	1 Thn	Terlaksananya langganan koran dan majalah	1 Thn	Terlaksananya langganan koran dan majalah	1 Thn	15.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Thn	Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Thn	Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Thn	350.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DKPP		1 Thn		1 Thn		1 Thn	250.000.000		

	Pengadaan mebel	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya jumlah paket mebel yang disediakan	1 Thn	Terlaksananya jumlah paket mebel yang disediakan	1 Thn		1 Thn	100.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya Komputer dan Printer	1 Thn	Tersedianya Komputer dan Printer	1 Thn	Tersedianya Komputer dan Printer	1 Thn	150.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DKPP		1 Thn		1 Thn		1 Thn	1.037.400.000		
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	1 Thn	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat	1 Thn	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat	1 Thn	10.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Jasa Komuikasi Sumber Daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Meningkatnya keperluan jasa komunikasi, air dan listrik	1 Thn	Tersedianya keperluan jasa komunikasi, air dan listrik	1 Thn	Terlaksananya keperluan jasa komunikasi, air dan listrik	1 Thn	140.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Terlaksananya Pembayaran Jasa Non ASN	1 Thn	Tersedianya Pembayaran Jasa Non ASN	1 Thn	Terlaksananya Pembayaran Jasa Non ASN	1 Thn	887.400.000	DKPP	Lanjutan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		DKPP		1 Thn		1 Thn		1 Thn	1.320.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Tersedianya pembayaran pajak kendaraan	1 Thn	Tersedianya pembayaran pajak kendaraan	1 Thn	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan	1 Thn	300.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Thn	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Thn	Meningkatnya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Thn	20.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	DKPP	Jumlah gedung kantor dang bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Thn	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Thn	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Thn	1.000.000.000	DKPP	Lanjutan

	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		DKPP							640.000.000		
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan		DKPP							310.000.000		
	Penyediaan Pangan berbasis Sumber daya lokal	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Tersedianya kegiatan promosi penganeekaragaman pangan berbasis pangan lokal	1 Paket	Tersedianya kegiatan promosi penganeekaragaman pangan berbasis pangan lokal	1 Paket	Terlaksananya kegiatan promosi penganeekaragaman pangan berbasis pangan lokal	1 Paket	80.000.000	DKPP	Lanjutan
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Pelaksanaan distribusi tepat sasaran	9 Kecamatan	Tersusunnya Pelaksanaan distribusi yang tepat sasaran	9 Kecamatan	Pelaksanaan distribusi tepat sasaran	9 Kecamatan	60.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Tersedianya cadangan pangan masyarakat	148,24 Kg/Kapita/t hn	Meningkatnya Ketersediaan cadangan pangan masyarakat	148,24 Kg/Kapita/t hn	Tersedianya cadangan pangan masyarakat	148,24 Kg/Kapita/t hn	100.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota									15.000.000		
	Pemantauan Harga dan Pasokan pangan									55.000.000		

	Penentuan Harga Minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi		DKPP		1 Paket		1 Paket		1 Paket	50.000.000		
	Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga Minuman pangan pokok lokal	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Terlaksananya koordinasi penentuan harga pangan lokal	1 Paket	Tersedianya koordinasi penentuan harga pangan lokal	1 Paket	Meningkatnya koordinasi penentuan harga pangan lokal	1 Paket	50.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		DKPP		1 Paket, 8 Kelompok		1 Paket, 8 Kelompok		1 Paket, 8 Kelompok	280.000.000		
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Tersedianya data pola pangan harapan (PPH)	1 Paket	Tersedianya data pola pangan harapan (PPH)	1 Paket	Tersedianya data pola pangan harapan (PPH)	1 Paket	30.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Terlaksananya Kegiatan Pangan Lestari	8 Kelompok	Terlaksananya Kegiatan Pangan Lestari	8 Kelompok	Tercapainya Kegiatan Pangan Lestari	8 Kelompok	250.000.000	DKPP	Lanjutan
	PROGRAM PENANGANAN									140.000.000		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan		DKPP		1 Buku		1 Buku		1 Buku	10.000.000		
	Penyusunan, pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Tersusunnya Buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Buku	Tersusunnya Buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Buku	Tersedianya Buku Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Buku	10.000.000	DKPP	Lanjutan

	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		DKPP		3 Kecamatan, 1 Paket		3 Kecamatan, 1 Paket		3 Kecamatan, 1 Paket	130.000.000	DKPP	
	Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan pangan	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan kabupaten	3 Kecamatan	Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan kabupaten	3 Kecamatan	Tercapainya Penanganan kerawanan pangan kabupaten	3 Kecamatan	50.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Tersedianya panganekaraga man konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	1 Paket	Terlaksananya panganekaraga man konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	1 Paket	Tercapainya panganekaraga man konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	1 Paket	80.000.000	DKPP	Lanjutan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									170.000.000	DKPP	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota		DKPP		1 Thn, 1 Paket		1 Thn, 1 Paket		1 Thn, 1 Paket	170.000.000		
	Rekomendasi Keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang mencukupi, aman dan mandiri	DKPP	Tersedianya alat uji keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Thn	Tersedianya alat uji keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Thn	Tersedianya alat uji keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Thn	50.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya pangan masyarakat yang aman dan cukup	DKPP	Terlaksananya sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	1 Paket	Terlaksananya sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	1 Paket	Terlaksananya sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	1 Paket	120.000.000	DKPP	Lanjutan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		DKPP									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									3.985.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		DKPP							475.000.000		

	Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya nyang Dapat Diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota		DKPP							315.000.000		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Tersediannya data sumberdaya perikanan tangkap	2 Desa Sempel	Terlaksananya data sumberdaya perikanan tangkap	2 Desa Sempel	Tercapainya data sumberdaya perikanan tangkap	2 Desa Sempel	15.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan	2 Kelompok	Sarana dan prasarana bidang perikanan	2 Kelompok	Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perikanan	2 Kelompok	150.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									150.000.000		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten /Kota		DKPP		90 Kelompok		90 Kelompok		90 Kelompok	160.000.000		
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Meningkatnya usaha kelompok perikanan tangkap	90 Kelompok	Terlaksananya usaha kelompok perikanan tangkap	90 Kelompok	Meningkatnya usaha kelompok perikanan tangkap	90 Kelompok	80.000.000	DKPP	Lanjutan

	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Tersediannya pengembangan kelompok nelayan perikanan tangkap	90 Kelompok	Tersediannya pengembangan kelompok nelayan perikanan tangkap	90 Kelompok	Meningkatnya pengembangan kelompok nelayan perikanan tangkap	90 Kelompok	80.000.000	DKPP	Lanjutan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		DKPP							3.015.000.000		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		DKPP		1.000.000		1.000.000		1.000.000	300.000.000		
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Kecil	Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang optimal	DKPP	Produksi bibit	1.000.000	Produksi bibit	1.000.000	Meningkatnya Produksi bibit	1.000.000	300.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pengelolaan Pembudidayaan ikan		DKPP		1 Lap, 100%, 1 Kgtn		1 Lap, 100%, 1 Kgtn		1 Lap, 100%, 1 Kgtn	2.715.000.000		
	Penyediaan Data dan informasi Pembudidayaan ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data statistik yang akurat	DKPP	Data Statistik Budidaya	1 Laporan	Data Statistik Budidaya	1 Laporan	Tersediannya Data Statistik Budidaya	1 Laporan	15.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan Prasarana Pembudiyaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten /kota	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Meningkatnya Pengembangan Budidaya Perikanan	100%	Tersediannya Sarana Produksi Perikanan Budidaya	100%	Produksi Hasil Ikan Budidaya Meningkat	100%	1.400.000.000	DKPP	Lanjutan

	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam I (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Stok ketersediaan bibit	100%	Stok ketersediaan bibit	100%	Tersedianya Stok ketersediaan bibit	100%	1.000.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya produksi perikanan yang sehat dan aman	DKPP	Meningkatnya pengendalian terhadap hama penyakit perikanan	1 Kegiatan	Terlaksananya pengamanan produksi perikanan	1 Kegiatan	Meningkatnya kesehatan ikan dan lingkungan	1 Kegiatan	50.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan di darat	100%	Pengembangan Produksi Budidaya Ikan	100%	tersedianya Produksi Budidaya Ikan di darat	100%	150.000.000	DKPP	Lanjutan
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Pengembangan kawasan budidaya	1 Kegiatan	Pengembangan kawasan budidaya	1 Kegiatan	Pengembangan kawasan budidaya	1 Kegiatan	100.000.000	DKPP	Lanjutan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKPP							300.000.000		

	Pengawasan Sumber Daya Perikanan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		DKPP		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	300.000.000		
	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota									150.000.000		
	Pengawasan usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	Terwujudnya sarana dan prasarana budidaya perikanan yang maju dan berkualitas serta berkembangnya kelompok pembudidaya ikan	DKPP	Pengembangan Budidaya berkelanjutan	1 Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	1 Kegiatan	150.000.000	DKPP	Lanjutan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		DKPP							195.000.000		
	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		DKPP		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	15.000.000		
	Penyediaan Data dan informasi usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota	Terpromosi nya produk unggulan daerah melalui kegiatan EXPO dan kegiatan pameran lainnya	DKPP	Tersedianya data hasil pengolahan dan data pemasaran ikan	2 Laporan	Tersedianya data hasil pengolahan dan data pemasaran ikan	2 Laporan	Terlaksananya data hasil pengolahan dan data pemasaran ikan	2 Laporan	15.000.000	DKPP	Lanjutan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil		DKPP		20 Orang		20 Orang		20 Orang	80.000.000		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang optimal	DKPP	Meningkatnya pengetahuan tentang standar pengolahan skala mikro dan kecil	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan tentang standar pengolahan skala mikro dan kecil	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan tentang standar pengolahan skala mikro dan kecil	20 Orang	80.000.000	DKPP	Lanjutan
	Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		DKPP		20 Orang		20 Orang		20 Orang	100.000.000		

	Pemberian Fasilitas bagi pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang optimal	DKPP	terlaksananya usaha perikanan skala mikro dan kecil	20 Orang	Tercapainya usaha perikanan skala mikro dan kecil	20 Orang	Meningkatnya usaha perikanan skala mikro dan kecil	20 Orang	100.000.000	DKPP	Lanjutan
TOTAL										14.512.598.711		